

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 9 /BA.DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : YOYOK RIYO SUDIBYO
Jabatan : Bupati Batang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. N a m a : H. I. TEGUH RAHARJO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang

b. N a m a : H. FAUZI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,

d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :

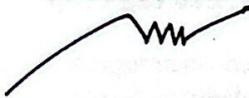
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
setelah di Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Hasil Pembahasan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

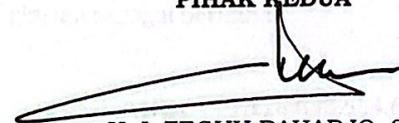
Batang, 22 Juni 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

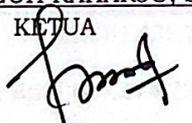


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

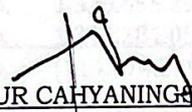


H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SUBBAG. ...PH.....	



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

1.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan	1.188.635.554.603,00	1.211.216.990.326,92	22.581.435.723,92
Belanja	1.326.555.291.781,00	1.212.281.052.709,93	(114.274.239.071,07)
Surplus (Defisit)	(137.919.737.178,00)	(1.064.062.383,01)	136.855.674.794,99
Pembiayaan			
- Penerimaan	146.693.658.753,00	146.693.658.753,00	-
- Pengeluaran	8.773.921.575,00	8.144.209.810,00	(629.711.765,00)
Jumlah Netto	137.919.737.178,00	138.549.448.943,00	629.711.765,00
SILPA			137.485.386.559,99

Uraian realisasi anggaran :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
 Rp. 22.581.435.723,92 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.118.635.554.603,00
- Realisasi	<u>Rp. 1.211.216.990.326,92</u>
Selisih lebih	Rp. 22.581.435.723,92

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (114.274.239.071,07)
 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.326.555.291.781,00
- Realisasi	<u>Rp. 1.212.281.052.709,93</u>
Selisih (kurang)	Rp. (114.274.239.071,07)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah
 Rp. 136.855.674.794,99 dengan rincian sebagai berikut :

- Defisit setelah perubahan	Rp. 137.919.737.178,00
- Realisasi	<u>Rp. 1.064.062.383,01</u>
Selisih lebih	Rp. 136.855.674.794,99

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	146.693.658.753,00
- Realisasi	Rp.	<u>146.693.658.753,00</u>
Selisih	Rp.	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. (629.711.765,00)** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	8.773.921.575,00
- Realisasi	Rp.	<u>8.144.209.810,00</u>
Selisih (kurang)	Rp.	(629.711.765,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 629.711.765,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	137.919.737.178,00
- Realisasi	Rp.	<u>138.549.448.943,00</u>
Selisih lebih	Rp.	629.711.765,00

3. Neraca per 31 Desember Tahun 2014, sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.695.427.694.892,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	<u>2.599.884.139,39</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.692.827.810.753,34

4. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2014	Rp.	146.057.279.258,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	155.721.535.071,99
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.	(156.785.597.455,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(8.144.209.810,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(6.665.872.239,24)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp.	137.487.956.950,99

5. SARAN, DAN REKOMENDASI

1. SARAN

- Untuk mengetahui perkembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha setelah adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- perlu adanya laporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu Sekretaris Daerah dalam waktu dekat diminta menyerahkan neraca Perusda Aneka Usaha kepada DPRD.

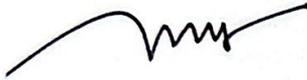
- b. Bupati dalam menempatkan direktur perusahaan daerah yang kompeten agar melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

2. REKOMENDASI

1. Bupati diminta segera mencukupi personil di Sekretariat DPRD, dengan personil yang cakap dan mampu bekerja, yang sangat dibutuhkan agar pelayanan kepada Anggota DPRD menjadi lebih baik, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Berkaitan dengan Galian Golongan C yang tidak berijin, Bupati melalui Instansi yang berwenang diminta untuk menindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

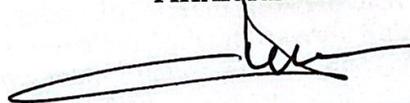
Batang, 22 Juni 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

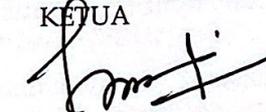


YOYOK RIYO SUDIBYO

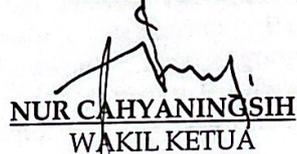
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



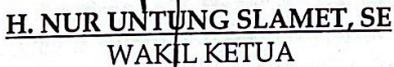
H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. KA.SUBBAG ...PH.....	